



Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Politik

Mira Rahmayanti¹⁾, Khozin²⁾, Moh. Nurhakim³⁾

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

mirarahmayanti@webmail.umm.ac.id¹⁾

khozin@umm.ac.id²⁾

nurhakim@umm.ac.id³⁾

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pendekatan guru PAI dalam mengajarkan Pendidikan politik bagi siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang menggunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan guru PAI dalam mengajarkan Pendidikan politik meliputi Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi dalam pengajaran tentang politik. Guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis isu-isu politik kontemporer dari perspektif Islam. Menggunakan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, atau kisah-kisah dari sejarah Islam yang relevan untuk menjelaskan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Mendorong siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan berpartisipasi dalam debat terbuka tentang isu-isu politik yang relevan dengan mengintegrasikan perspektif Islam. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proses politik secara positif, seperti pemahaman tentang pentingnya hak suara, memahami proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Kata kunci: Integrasi, Nilai-nilai Islam, Pendidikan Politik

Abstract

The aim of this research is to describe PAI teachers' approaches to teaching political education to students. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model are data reduction, data display and conclusion drawing. The technique for ensuring the validity of the data used is triangulation. The results of this research show that PAI teachers' approach in teaching political education includes teachers being able to integrate Islamic values such as justice, honesty, social responsibility, and participation in teaching about politics. Teachers can invite students to analyze contemporary political issues from an Islamic perspective. Using sources such as the Koran, Hadith, or relevant stories from Islamic history to explain political and governmental concepts in Islam. Encourage students to discuss, exchange opinions, and participate in open debates on relevant political issues by integrating Islamic perspectives. Inviting students to be involved in the political process positively, such as understanding the importance of voting rights, understanding the democratic process, and how they can contribute to building a better society.

Keyword: Integration, Islamic Values, Political Education



PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah kegiatan edukatif yang intensional dan sistematis untuk mengarahkan individu pada proses belajar berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam kegiatan politiknya. Saat ini, pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat umum cenderung kurang efektif, bahkan dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena sedikitnya peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendidikan politik (Asmika Rahman, 2019). Pendidikan merupakan proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidikan. Adanya relasi sosial yang berbeda dalam wadah suatu negara, yang berutang pada renggang dan dekatnya relasi sosial antara individu dengan individu lain, akan menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh di negara Demokrasi yang menghargai perbedaan yang unik pada setiap individu. Oleh karena itu, orang menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi pribadi-pribadi yang unik (Sunarso, n.d.).

Menurut Kartini Kartono bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi (Ildrus Affandi, 2000).

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W.Apple dalam Tilaar menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauankemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat (Abdul Rahim, Sukarno, 2021).

Salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pendidikan politik yang berisikan pengetahuan politik yang menjadi salah satu landasan hidup suatu bangsa. Pengetahuan politik merupakan informasi yang diperoleh individu atau kelompok dari berbagai gejala dan fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Surbakti mengemukakan bahwa "Pengetahuan politik merupakan informasi yang memusatkan perhatian pada perilaku individu dan kelompok dalam interaksinya dengan lembaga-lembaga pemerintahan"(Sundari Utami, Umi Chotimah, n.d.).

Guru memiliki sebagian dari tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan, yaitu pada saat peserta didik dilimpahkan kepada guru saat di sekolah. Membina dan mengarahkan peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab semua guru, tidak terkecuali guru Pendidikan Agama Islam (PAI) (Kamilia Rahmawati, 2021). Dimensi pertama profil pelajar pancasila dimulai dengan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sangat strategis, baik sebagai teladan maupun pelopor. Guru sebagai pendidik mempunyai peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, diharapkan dapat menerapkan perilaku yang positif dilingkungan sekolah dan khususnya di masyarakat (Kartiwan et al., 2023).

Pada saat wawancara dengan salah satu guru PAI DI SMAN 6 Padangsidempuan beliau mengatakan bahwa sebagian besar siswa banyak yang tidak paham dengan konsep politik sebagai upaya menumbuhkan kesadaran politik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan siswa di sekolah salah satunya tidak peduli dengan pemilihan umum (pemilu), banyak diantara siswa yang tidak ikut memilih atau golput saat pemilu dan ketidakpekaan terhadap politik. Salah satu peran guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang harus menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi siswa. Adapun salah satu tema pada materi pelajaran PAI kelas XII tentang "Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi" dan sub temanya Bersatu dalam keragaman, menganalisis dan mengevaluasi makna Qur'an Surah Al-Imran.

Untuk itu yang dilakukan oleh seorang guru dalam menanamkan pengetahuan politik kepada siswa dan memiliki pemahaman politik dengan baik dan benar agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Oleh sebab itu peneliti ingin melihat bagaimana seorang guru PAI dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa agar siswa lebih peka terhadap dunia politik untuk memberikan aspirasi politik sesuai dengan sistem demokrasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.



METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Moleong, 2006) Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Padangsidempuan. Sumber data yang dimaksud disini adalah subjek dari mana data diperoleh dan dipilih berdasarkan kriteria menggunakan purpose sampling dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan sehingga, tidak dapat dilakukan secara acak. Sumber datanya adalah kepala sekola, guru Pendidikan agama Islam, siswa kelas XII SMAN 6 Padangsidempuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi. Teknik pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti membandingkan hasil wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Miles, M. B., 1992) adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siswa SMA merupakan generasi Z. Generasi Z khususnya yang sangat dekat dengan gadget dan media sosial. Interaksi dengan teman-teman di sekolahnya bahkan untuk berdiskusi tentang pekerjaan rumah dan tugas sekolah seringkali dilakukan melalui media sosial. Itu sebabnya, generasi Z menjadi rentan dan dapat dengan mudah terpapar informasi hoax dan berita bohong di media sosial. Bahkan mereka yang akan menjadi pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan anggota DPR RI, DPRD tingkat I dan II, serta anggota DPD secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 membutuhkan pendampingan khusus agar tidak termakan kampanye hitam yang kerap dilakukan oleh elit politik dan para pendukung partai politik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Kominfo telah menjaring 771 konten hoax atau berita palsu menjelang Pemilu. Berita palsu tersebut disebarluaskan sejak bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019. Mayoritas dari informasi hoax tersebut berkaitan dengan politik menjelang Pilpres 2019. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humasnya, Ferdinandus Setu menegaskan bahwa sebanyak 181 dari 771 konten hoaks tersebut berkaitan dengan isu politik. Informasi hoaks tersebut menyerang baik kedua pasangan capres dan cawapres nomor 01 dan nomor 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019. (Damayanti et al., 2019). Itu sebabnya guru PAI perlu melakukan pendekatan dalam mengajarkan Pendidikan politik pada siswa kelas XI SMAN 6 Padangsidempuan yang akan menjadi pemilih pemula dalam Pilpres dan Pileg 2019 ini, sekaligus memberikan pengetahuan kepada mereka untuk dapat membedakan informasi yang benar dan hoax yang banyak beredar melalui media sosial.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan politik sendiri diantaranya; (1) membangun kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam fungsi sosial dan politik; (2) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik; (3) meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tentang politik; serta (4) mendorong peningkatan kadar partisipasi politik aktif di tengah masyarakat. (Idrus Affandi, 2000)

Pendidikan politik adalah bagian penting dalam pendidikan untuk membentuk pemahaman yang baik tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga negara, dan kesadaran politik. Bagi guru Pendidikan Agama Islam, pendekatan dalam mengajarkan pendidikan politik pada siswa dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi dalam pengajaran tentang politik. Dengan demikian, siswa dapat memahami bagaimana nilai-nilai agama mereka terkait dengan praktik politik. Mengajarkan siswa tentang etika politik dalam Islam seperti pentingnya amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), tata cara berpolitik yang baik, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis isu-isu politik kontemporer dari perspektif Islam. Hal ini membantu siswa untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks politik modern. Menggunakan sumber-sumber seperti Al-Qur'an,



Hadis, atau kisah-kisah dari sejarah Islam yang relevan untuk menjelaskan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Mendorong siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan berpartisipasi dalam debat terbuka tentang isu-isu politik yang relevan dengan mengintegrasikan perspektif Islam. Mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang kritis dengan memberikan informasi yang seimbang, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengembangkan kemampuan analisis yang objektif terhadap informasi politik yang mereka terima. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proses politik secara positif, seperti pemahaman tentang pentingnya hak suara, memahami proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Pendekatan ini membantu siswa memahami pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendekatan-pendekatan ini dapat saling terkait dan bergantung pada tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, serta konteks sekolah atau kurikulum yang diterapkan. Penting bagi guru Pendidikan Agama Islam untuk memadukan ajaran agama dengan pemahaman yang mendalam tentang politik dan memberikan pemahaman yang seimbang kepada siswa tentang bagaimana Islam memandang dan berkontribusi dalam kehidupan politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan guru PAI dalam mengajarkan Pendidikan politik bagi siswa dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi dalam pengajaran tentang politik. Mengajarkan siswa tentang etika politik dalam Islam seperti pentingnya amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), tata cara berpolitik yang baik, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis isu-isu politik kontemporer dari perspektif Islam. Hal ini membantu siswa untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks politik modern. Menggunakan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, atau kisah-kisah dari sejarah Islam yang relevan untuk menjelaskan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Mendorong siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan berpartisipasi dalam debat terbuka tentang isu-isu politik yang relevan dengan mengintegrasikan perspektif Islam. Mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang kritis dengan memberikan informasi yang seimbang, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengembangkan kemampuan analisis yang objektif terhadap informasi politik yang mereka terima. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proses politik secara positif, seperti pemahaman tentang pentingnya hak suara, memahami proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya
- Hendro Puspito. (2007). *Sosiologi*. Jakarta: Esis.
- Suhendra, D. (2016). Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 1(1), 34–48. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/138>
- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. (1988). *Communication Theories: Origins, Methods, Uses* (2th ed.). New York: Longman Inc.
- Abdul Rahim, Sukarno, M. E. W. (2021). *VOLUME 6 NO. 1, Januari - Juni 2021*. 6(1), 10–25.
- Asmika Rahman, S. (2019). Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 33–38. <https://doi.org/10.21067/jip.v9i1.2904>
- Damayanti, A., Siahaan, C., Robertua, V., Sari, I. N., & Narida, M. G. (2019).



Pendidikan Politik Bagi Generasi Milenial di SMA Global Prestasi, Kalimalang, Bekasi Barat. *JURNAL Comunit  Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 70–79.
<https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1272>

Ghony, D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.

Idrus Affandi. (2000). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. *Modul Pendidikan Politik*, 1–19.

Miles, M. B., dan A. M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.

Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Sunarso. (n.d.). Pendidikan politik dan politik pendidikan urgensinya bagi sebuah bangsa. *Jurnal PKn Dan Hukum, FISE, UNY*, 1–9.